



PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAERAH (APBD)

(Study Empiris Di Provinsi Papua)

SIMSON WERIMON

Universitas Papua

IMAM GHOZALI

Universitas Diponegoro Semarang

MOHAMAD.NAZIR

Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang di moderasi oleh Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran dan variable dependennya adalah pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Papua periode 1999-2009, diperoleh dengan menggunakan teknik Purpose Random Sampling. Jumlah Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 313. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei langsung pada wilayah yang dapat dijangkau dan mail survei serta kontak person secara khusus pada wilayah tidak dapat dijangkau. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan multiple regression untuk masing-masing sample.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) pada level (p value) 0,018. Kedua interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,03 dengan koefisien regresinya bernilai -2,403, ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,266, ke empat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar = 0,266.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan daerah (APBD).



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat memburuk, berdampak pada Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan serta mengarah pada reformasi. Salah satu bagian dari reformasi adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Dalam menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan, Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan Pendidikan, Pengetahuan, Pengalaman, dan Keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopanah (2003), membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan



daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memecahkan permasalahan diatas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1) Apakah pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 2) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) 3) Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) 4) Apakah Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menguji: Pertama Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), kedua Pengaruh interaksi Partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), ketiga Pengaruh Interaksi Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah



(APBD), keempat Pengaruh interaksi Pengetahuan Dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*).

II. Telaah Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau menginterpretasikan kejadian-kejadian, tujuan-tujuan masyarakat itu sendiri. Siegel dan Marconi mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren atas dunia. Gordon (1991) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara Pandang manusia terhadapnya. Siegel dan Marconi (1989) Pengalaman masyarakat di dunia



ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada Stimuli fisik (*Physical stimuli*) dan Keadaan mudah terpengaruhnya individual (*Individual Predispositions*). Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target.

2.1.2. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengetian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

2.1.3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat



proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

2.2. Kerangka konseptual

Gambar Kerangka Konseptual :

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan, bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik .Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

2.3.2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)



Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*). Dalam literatur keuangan dikenal teori keagenan yang menjelaskan hubungan antar dua pihak yaitu pihak pemilik (*prinsipal*) dengan pihak pengelola (*agen*). Salah satu hipotesis dalam teori keagenan adalah manajemen mencoba memaksimalkan kesejahteraannya dengan cara mengurangi berbagai biaya agen yang muncul dari *monitoring* dan *contracting* (Wolk, Terney & Dood, 2000). Untuk memonitor apa yang dilakukan oleh manajemen maka pemilik mengharuskan manajemen membuat laporan keuangan yang melaporkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Kalau dianalogikan pada organisasi pemerintah daerah dan DPRD dalam hal manajemen laporan keuangan yang berbasis kinerja pada hakekatnya adalah sama. LeLoup (1986), Wildaysky (1975, 1984, 1991) dan Rubin (1993), penganggaran merupakan suatu proses politik yang melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keagenan, Pemda atau eksekutif adalah merupakan agen, dan DPRD atau legislatif adalah prinsipal.

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga dapat hipotesis dirumuskan sebagai berikut :



H2 : *Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*

2.3.3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*)

Mardiasmo, 2003, menyebutkan Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut : 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



H3 : Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk mengetahui bahwa apakah dengan semakin tingginya pengetahuan dewan tentang anggaran, adanya partisipasi masyarakat serta adanya transparansi kebijakan publik akan meningkatkan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan, maka perlu diuji secara simultan, sehingga hipotesis keempat dari penelitian ini adalah :

H4 : Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

III.METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari 12 wilayah DPRD kabupaten se-Provinsi Papua sebelum pemekaran. Jumlah anggota DPRD kabupaten se-Papua sebanyak 275 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dengan kriteria, Kabupten Kota yang telah Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan jumlah anggota dewan minimal 19 orang.

3.2. Variabel Penelitian dan Defevinisi Operasional Variabel

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran



Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan.

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

3.4. Instrumen Penelitian

a. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

b. Uji Reabilitas dan Validitas



Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel . (Ghozali 2002). Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. (Ghozali 2002)

c. Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA)

Untuk mengetahui bahwa suatu indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk maka peneliti menggunakan *Confirmatory Faktor Analisis (CFA)*, dengan melihat Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of *Sampling Adequacy* (KMO MSA) dan Bartlett's *test of Sphericity* (BTS).

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua sebelum diadakan Pemekaran, yang terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada 12 (dua belas) wilayah kabupaten Provinsi Papua. Waktu penelitian adalah selama 2 (dua) bulan 1 minggu

3.6. Teknik Analisis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan *multiple regression* untuk masing-masing sample, berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikansi silmultan (F test), uji signifikansi Parameter Individual (t statistik) R square.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_2 + b_5X_1X_3 + b_6 X_1X_2X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- Y..... : Pengawasan Keuangan daerah (APBD)
- a..... : Konstanta
- b1, b2, b3, b4, b5, b6..... : Koefisien regresi



- X1..... : Pengetahuan Tentang Anggaran
X2..... : Partisipasi Masyarakat
X3..... : Transparansi Kebijakan Publik
X1,X2..... : Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat
X1,X2,X3..... : Interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.
e..... : Error

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Demografi Responden

a. Partisipasi Responden per wilayah

Jumlah anggota dewan perkabupaten dijabarkan Pada tabel 1 Dibawah ini

Dasar perhitungan besarnya sampel digunakan rumus Solvin (1960), yang dikutip dalam Husain Umar (2003). Tabel 2 ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan respond rate (rr) penelitian.

Tabel 3 Rangkuman Pengiriman Kuisisioner dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

b. Responden Berdasarkan Wilayah

Responden dari daerah Kabupaten Sorong yang turut berpartisipasi berjumlah 18 responden (23%), dari Kabupaten Manokwari 25 responden (31%), dan Kabupaten Biak 13 responden (26%), Kabupaten Serui 6 responden (8%), Kabupaten Jayapura 1 responden (1%), Kota Jayapura 17 responden (21%). Jadi responden yang paling banyak berpartisipasi adalah dari Kabupaten Manokwari sebanyak 25 responden.

c. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.

Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian berkisar antara usia antara 20 tahun sampai dengan 68 tahun berjumlah, usia responden yang paling



banyak adalah berusia antara 40 tahun sampai dengan 46 tahun sebanyak 20 responden , sedangkan jumlah partisipasi responden pria adalah sebanyak 73 (91%) dan responden wanita adalah sebanyak 7 (9%).

d. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Jenjang pendidikan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari Responden yang berpendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), Strata Satu (S1), Pascasarjana (S2), Jadi responden yang paling banyak adalah Sekolah responden dengan tingkat pendidikan Menengah Lanjutan Atas sebanyak 37 responden.

e. Responden Berdasarkan Jabatan Dewan dan Komisi-komisi.

Gambaran responden dari sisi jabatan yang diemban saat ini terdiri dari responden yang mengemban jabatan Ketua DPRD berjumlah 3 Responden (4%) dan Jabatan Wakil Ketua berjumlah 4 responden (5 %), ditinjau dari jabatan pada komisi-komisi adalah: Komisi A berjumlah 21 responden (26%), Komisi B berjumlah 18 responden (23%), Komisi C berjumlah 22 responden (28%), Komisi D berjumlah 12 responden (15%). Jadi tingkat partisipasi responden pada keempat komisi yang paling banyak adalah adalah pada komisi C sebanyak 22 responden.

4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Jumlah responden dalam adalah sebanyak 80, tetapi berdasarkan *screening* terhadap normalitas data terdapat 2 responden terdeteksi outlier maka telah dikeluarkan, sehingga jumlah responden yang digunakan adalah sebanyak 78. Pada tabel 4 disajikan ringkasan statistik deskriptif berupa gambaran kisaran teoritis, kisaran nyata, rata-rata dan standar deviasi yang terjadi.

4.1.4. Uji Reabilitas



Tabel 5 ringkasan hasil uji reabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian setelah skor butir pertanyaan yang tidak tidak signifikan dikeluarkan dari model.

Hasil uji reabilitas diatas adalah: *cronbach alpha* untuk masing-masing konstruk $< 0,60$ yang menurut kriteria Nunali (1967) dikatakan realibel, hanya pada konstruk Partisipasi Masyarakat yang *cronbach alpha*nya < 60 (0,58).

4.1.5. Uji Validitas.

a. Validitas Konstruk Pengetahuan dan Uji Confirmatory Faktor Analysis (CFA)

Tabel 6 disajikan ringkasan hasil uji validitas konstruk Pengetahuan.

Hasil uji validitas pada tabel 6 diatas, adalah : variabel PENGETAH, PARTISIP, TRANSPAR, dan PENGAWAS nilai signifikan pada level 0,01-005. maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid.

Tabel 7 disajikan ringkasan hasil uji Confirmatory Faktor Analisis (CFA).

Berdasarkan hasil uji CFA diatas, Nilai Kaiser- Meyer-Oklin of Sampling Adequacy (KMO MSA) untuk masing-masing variabel $> 0,50$ memenuhi asumsi analisis faktor dan realibel serta nilai Bartlett's *test of Sphericity* (BTS) dengan *chi-square* signifikan maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Hasil analisis faktor untuk masing-masing variabel, dari 5 indikator variabel PENGETAH, terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eigenvalue > 1 dengan nilai loading faktor = 58,86%, artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGETAH dengan variasi sebesar 58,86 % ,didalamnya berisikan indikator dari 1-5. Untuk variabel PARTISIP, terdapat 6 indikator terbentuk dalam 2 faktor berdasarkan eigenvalue > 1 dengan nilai loading faktor = 68,78%, artinya ke dua faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PARTISIP dengan variasi



sebesar 68,78 % didalamnya berisikan indikator dari 1-6, Variabel TRANSPAR, terdapat 8 indikator terbentuk dalam 3 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 68%, artinya ke tiga faktor tersebut mampu menjelaskan variabel TRANSPAR dengan variasi sebesar 68% didalamnya berisikan indikator dari 1-6 dan Untuk variabel PENGAWAS, terdapat 10 indikator terbentuk dalam 4 faktor berdasarkan eigenvalue >1 dengan nilai loading faktor = 71,15%, artinya ke empat faktor tersebut mampu menjelaskan variabel PENGAWAS dengan variasi sebesar 68,78 % yang didalamnya berisikan indikator dari 1-10. Berdasarkan hasil rotasi komponen matriks pada lampiran analisis faktor, menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki undimensionalitas atau dengan kata lain semua indikator yang digunakan memiliki faktor penjas yang kuat sehingga disimpulkan bahwa masing-masing skor butir pertanyaan adalah valid.

4.1.5. Pengujian Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dari ketiga variabel independen yang diuji, tidak terdapat korelasi antar variabel yang melebihi batas 90%, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas yang serius. Hasil perhitungan nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* < 0,10, yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independent yang lebih dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel independen yang diuji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi. Tabel 8 berikut disajikan ringkasan hasil uji multikolinieritas.



b. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson nilai DW untuk ketiga variabel independent adalah 1,745, nilai tabel dengan menggunakan $\alpha=5\%$, jumlah Sampel sebanyak 78 serta jumlah variabel independen = 3, maka diperoleh nilai $d_l = 1,543$ dan $d_u = 1,709$ dan $DW = 1,745$. Oleh karena nilai DW 1,745 lebih besar dari batas atas (d_u) 1,709 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini. Pada tabel 9 berikut disajikan ringkasan hasil uji Durbin Watson.

c. Hasil Uji Heteroskedastitas

Berdasarkan grafik *scartterplots* hasilnya menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel pengawasan keuangan daerah berdasarkan masukan dari variabel independen pengetahuan, partisipasi dan transparansi.

d. Hasil Uji Uji normalitas

Dalam pengujian ini peneliti menggunakan analisis statistic *one-Sampel Kolmogorov-Sminorv test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji K-S menunjukkan bahwa besarnya nilai K-S adalah 0,907 dan signifikan pada 0,383, maka hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Pada tabel 10 Berikut disajikan ringkasan hasil uji Normalitas Data.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pengujian hipotesis I

Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan



terhadap pengawasan keuangan daerah.

Tabel 11 disajikan ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis pertama.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis 1 pada tabel 11 dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,001, serta hubungan koefisien regresinya adalah 0,772. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,411 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai dari F hitung sebesar 5,813 ($>f$ tabel 1,583) dengan tingkat signfikan 0,01 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah.

4.2.2. Pengujian Hipotesis 2

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 12 hasil regresi dari hipotesis kedua.

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke dua, pada tabel 12, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung hasil regresi adalah -2,125 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD



dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037 serta hubungan koefisien regresinya adalah -0,072. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa 86 % variasi variabel pengawasan APBD yang dilakukan dewan dapat dijelaskan variabel pengetahuan, partisipasi, transparansi dan interaksi variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan sisanya 14 % disebabkan faktor lain diluar model.

4.2.3. Pengujian Hipotesis 3

Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 13 ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 3.

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel 13, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2,74 dengan tingkat signfikan 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -0,365 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,716, serta hubungan koefisien regresi adalah -2,430.

4.2.4. Pengujian Hipotesis 4



Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).

Tabel 14 ringkasan hasil regresi untuk pengujian hipotesis 4.

Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke tiga pada tabel 14, dapat dilihat bahwa Nilai F hitung sebesar 85,854 dan F tabel 2, 274 dengan tingkat signifikansi 0,00 jauh dibawah 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi variabel pengetahuan dan partisipasi terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dilihat dari Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,222 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,991), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,226, serta hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 8,370.

4.2.5. Pembahasan.

4.3.1. Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,183 ($<\alpha$ 0,05), atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, sehingga hasil penelitian ini menerima



hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah (2003), Andriani (2002), Sutarnoto, 2002, Indradi, 2001 dan Syamsiar, 2001;2002;). Dilihat dari koefisien Determinasinya = 0,05, hal ini berarti 50 % variasi pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD).

4.3.2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,037. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi dengan tanda (*sign*) adalah -8,072 meskipun nilai *P valuenya* signifikan sebesar 0,037 sehingga hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua. Hal menunjukkan bahwa walaupun ketika dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, namun stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian terdahulu



yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang tidak dapat menyimpulkan hasil uji hipotesis ke dua, ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian terdahulu disebabkan karena perbedaan hasil uji sampel. Peneliti terdahulu melakukan uji interaksi dengan menggunakan persepsi dewan dan persepsi masyarakat sementara penelitian ini hanya menguji interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran serta persepsi dewan tentang transparansi kebijakan publik. Hasil penelitian konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Harapannya adalah ketika terjadi reformasi anggaran pada sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan Dewan dapat menginterpretasikan *stimuli* yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998).

4.3.3. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat interaksi antara antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya (*P-Value*) sebesar 0,716. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar -2,340 dan *P-valuenya* jauh diatas $<\alpha$ 0,05 maka



penelitian ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, tidak diterima. Hal menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan publik, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sopanah (2003). Peneliti sependapat dengan peneliti terdahulu bahwa "Transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana " dan "implementasinya masih dalam tahap formalitas" sementara akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (1987) menyatakan bahwa Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan serta tidak terlepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu, didasarkan darimana perilaku itu timbul, secara internal atau eksternal. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebah luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

4.3.4. Pengetahuan dewan tentang anggaran, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik, secara bersamaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD).



Berdasarkan Hasil uji signifikansi simultan terhadap hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,266. Hubungan ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 8,260 artinya walaupun semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan *good corporate governanance* tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran. Temuan ini konsisten teori yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989), Matlin (1998) seperti yang telah dijelaskan diatas.

V.PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini: 1) Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 2) Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ke dua dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD . 3) Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. 4) Berdasarkan Hasil



uji hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

5.2. Keterbatasan

1) Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD se-Papua, dengan mengambil seluruh komisi (Komisi A, B, C dan D), dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap komisi yang membidangi masalah anggaran. 2) Luasnya wilayah penelitian.. 3) Masa jabatan. 4) Instrumen pengambilan, dikembangkan dari peneliti terdahulu dan berdasarkan *pilot test*, namun konstruk penelitian yang diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pernyataan setelah *pilot test* kurang banyak dan kurang variatif, 5) Variabel Independen dan Model

5.3. Saran dan Implikasi

Bagi Penelitian Selanjutnya, Penelitian mendatang pada saat pengambilan sampel hendaknya memilih sampel anggota dewan yang membidangi anggaran. b) Menggunakan teknik pemilihan sampel area (*Area Sampling*) c) Menggunakan uji beda (*t-test*). d) Melakukan *pilot tes* secara berulang. e) menggunakan Uji residual untuk menghindari multikolinieritas yang tinggi antara variabel dependen dan independen.

Bagi Kebijakan, Bagi anggota Dewan, untuk meningkatkan kinerjanya diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dalam pengambilan keputusan tidak salah. Pengetahuan sangat terkait dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman. b) Sementara, bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan publik c) Sedangkan bagi partai



politik diharapkan dapat mengkaderkan anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
- Andrianto Rinto, 2002, *Memahami Anggaran Publik*, Cetakan Pertama, Idea Press, Jogjakarta.
- Alamsyah, 1997, *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis MAP UGM , Jogjakarta.
- Bazwir, Revrison, 1999, *Akutansi Pemerintah Indonesia*, Edisi tiga BPFE Jogjakarta.
- Cooper, D.R. & C.W.Emory, 1995, *Bussines Research Methods*. 5th Edition, USA, Irwin.
- Dobell, Peter dan Ulrich, 2003. Parliament's performance in the budget process: A case study. *Policy Matter*: <http://www.irpp.org>.
- Fatchurrochman, Agam, 2002, *Manajemen Keuangan Publik*, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coroption Watch.
- Ghozali.Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. (2004) *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ichsan, M, Ratih dan Trilaksono, N, 1997, *Administrasi keuangan Daerah: Pengelolaan dan penyusunan APD*, Malang, Brawijaya University Pers.
- Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Tesis S2 Tidak di



Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.

Indriantoro dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPF., Jogjakarta.

Kaiser, H. dan Rice, J., 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No .1, Page 111-117.

Kurniawan, J.Luthfi, 2003, *Diskusi Anggaran Publik*, 2 Agustus 2003, Malang Corruption Watch, Malang.

_____ *Kumpulan Peraturan Sebagai Pedoman Tugas Pimpinan Dan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota 2004-2009*, Pustaka Info Data Indonesia, Jakarta.

Loina Lalolo Krina P. Agustus 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

LeLoup, Lance T. 1986. *Budgetary Politics*. Third edition. Brunswick, Ohio: King's Court Communications, Inc, dalam Halim. (2004), *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*, Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta.

Nunnally, 1967, *Psychometric Theory*, McGraw-Hill, New York.

Pramono, Agus H., 2002, *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.

Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.



- Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Pustaka Pergaulan Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara*, Cipta Jaya Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara*, Tamita Utama Jakarta.
- _____, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*, Citra Umbara, Bandung.
- _____, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1999 tentang tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*, Citra Umbara, Bandung.
- _____, 2001, *Departemen Dalam Negeri, Konsep dan Paduan Perencanaan Anggaran Daerah*, Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Jakarta.
- Rubin, Irene, 1996, *Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s*, *Journal Public Budgeting & Finance*, Summer, pp. 1 12-132.
- Rubin, Irene S. (Ed.). 1988. *New Directions in Budget Theory*. New York, NY: State University of New York Press, dalam Halim.A. (2004), *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*. Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sjamsudin, Syamsiar, 2001, *Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang*, Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial, Vol.13, No.2, Malang.
- Sutarnoto, Tejo, 2002, *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Sopannah, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*.(Tesis Program Pascasarjana MAKSI UGM Yogyakarta) SNA VI Surabaya, oktober 2003, p1160.
- Truman, David B, 1960, *The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion*, Alfred A Knof, New York, pp 333, dalam Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan*



Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta).

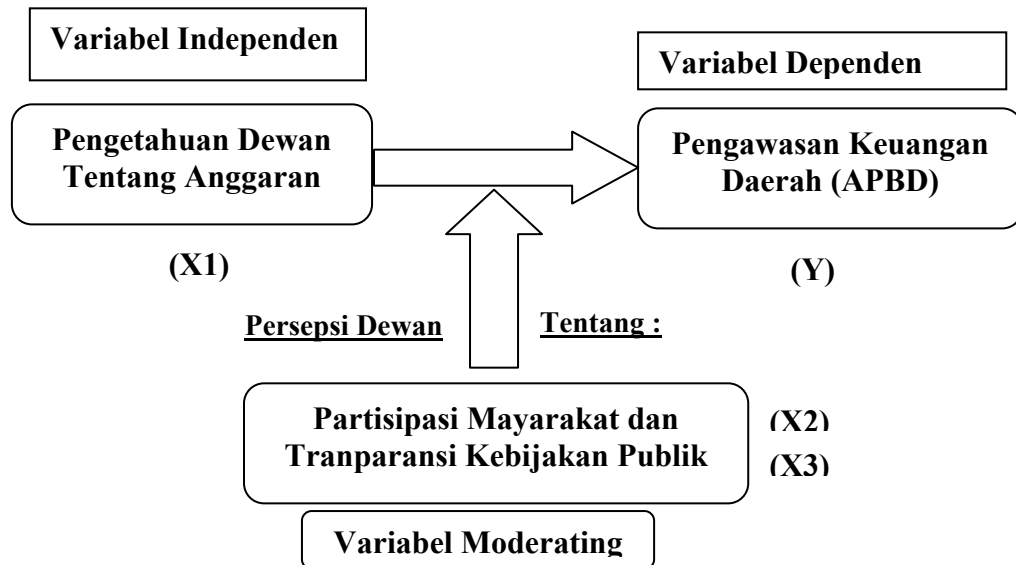
Wolk, Tearney dan Dodd (2000), *Accounting Theory*, fifth Edition, South Western College Publishing.

Wildaysky, Aaron. 1975. *Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Process*. Boston: Little, Brown and Company.

Yudono, Bambang, 2002, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm>.



Gambar 1. Kerangka konseptual



Tabel 1. Anggota DPRD Kabupaten Se-Papua.

No	DPRD	Σ Anggota/ Orang
1	Kabupaten Sorong	25
2	Kota Sorong	30
3	Kabupaten Manokwari	25
4	Kabupaten Biak	20
5	Kabupaten Yapen Waropen	20
6	Kabupaten Nabire	20
7	Kabupaten Merauke	20
8	Kabupaten Fak-Fak	20
9	Kabupaten Mimika	20
10	Kabupaten Jayawijaya	20
11	Kabupaten Jayapura	25
12	Kota Jaya Pura	30
Total		275

Sumber: Sekretariat DPRD Per Wilayah. 2005

Tabel 2. Ringkasan perhitungan Populasi, sampel dan *respond rate* (rr) penelitian.

No	Keterangan	Hasil
1	DPRD	12 ^a
2	Anggota DPRD	30 ^b
3	N (populasi)	360 (a x b)
4	e ² <i>error sampling</i>	10%



5	$n \text{ (sample)} = N/1+ e^2$	78 ^c
6	% Respon rate (rr)	25 ^d
7	Kuisisioner yg Dibagikan	313 (c /d x 100)

Sumber: Data Primer diolah. 2005

Tabel 3 . Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner

No	Keterangan	Σ Kuisisioner
1	Kuisisioner yang didistribukan	313
2	Kuisisioner tidak dikembalikan	153
3	Kuisisioner yang kembali	160
4	Kuisisioner yang tidak lengkap	16
5	Kuisisioner yang Rusak	50
6	Kuisisioner yang di kembalikan lebih dari batas waktu	14
7	Kuisisioner yang diolah	80
8	Respon rate (Prosentase)	51%

Sumber: Data Primer di Olah, 2005

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan, Partisipasi,Transparansi dan Pengawasan.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAH	78	20	28	24,6	2,0
PARTISIP	78	26	45	33,8	4,5
TRANSPAR	78	25	40	33,7	3,0
PENGAWAS	78	66	94	77,1	5,9
Valid N (listwise)	78				

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas.

No	Variabel	Cronbach Alpha
1	Pengetahuan Anggaran	0,63
2	Partisipasi Masyarakat	0,57
3	Transparansi KP	0,72
4	Pengawasan APBD	0,64

Sumber: Data Primer diolah, 2005

Tabel 6 Uji Validitas.

No	Variabel	Person correlation	Significant	Status
1	PENGETA	395**-.718**	0,000-0,000	Valid
2	PARTISIP	256 *-374**	0,001-0,046	Valid
3	TRANSPAR	321**-.726**	0,001-0,004	Valid
4	PENGAWAS	352**-.585**	0,001-0,002	Valid



* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)
 **Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber: Data Primer di olah .2005

Tabel 7. Hasil Uji *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*.

Variable	KMO & BARLET TES			Total Variance Explained		ROTATE COMPONENT MATRIX
	KMO	BTS chi-square	Sig.	Component	Eiginvalues /Loading %	Total Component
PENGETAH	0,505	35,579	0,000	5	58,86	2
PARTISIP	0,785	151,889	0,000	6	69,78	2
TRANSPAR	0,708	157,767	0,000	8	69,0	3
PENGAWAS	0,584	222,635	0,000	10	71,15	4

Sumber: Data Primer diolah.2005

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas.

Model		TRANSPAR	PENGETAH	PARTISIP	Collinearity Statistics		
					Tolerance	VIF	
1	Correlations	TRANSPAR	1,000	-0,072	-0,380	0,903	1,107
		PENGETAH	-0,072	1,000	-0,253	0,777	1,287
		PARTISIP	-0,380	-0,253	1,000	0,826	1,211
	Covariances	TRANSPAR	0,008	-0,001	-0,002		
		PENGETAH	-0,001	0,016	-0,002		
		PARTISIP	-0,002	-0,002	0,004		

Sumber : Data Primer Diolah, 2005

Tabel 9. Hasil Uji Durbin Watson.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	dl	du
1	0,933	0,871	0,865	2,14536	1,745	1,543	1,709

Sumber: Data Primer diolah, 2005.



Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			78
Normal Parameters	a,b	Mean	-,0033592
		Std. Deviation	2,13127875
Most Extreme Differences		Absolute	,103
		Positive	,103
		Negative	-,079
Kolmogorov-Smirnov Z			,907
Asymp. Sig. (2-tailed)			,383

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Tabel 11. Hasil Regresi Hipotesis Pertama

No	Keterangan	n	Adj R ²	F value	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
1	Sampel Dewan	78	0,05	5,813	0,01			
	Kostanta					58,132	7,353	0,000
	Pengetahuan Dewan					0,772	2,411	0,001
					F(tabel) = 3,98	t (tabel) = 1,992		

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Tabel 12. Hasil Regresi Hipotesis Kedua.

Keterangan	N	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-Value	p-Value
Sampel Dewan	78	85%	85,854	0,00			
Kostanta					-7,301	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,476	1,340	0,184
Partisipasi					2,436	2,852	0,006
Interaksi Pengetahuan & Partisipasi					-8,072	-2,125	0,037
				F (tabel) = 2,74	t (tabel) = 1,991		

Sumber : Data Primer diolah, 2005.

Tabel 13. Hasil Regresi Hipotesis Ketiga.

Keterangan	n	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
Sampel Dewan	78	86%	85,854	0,00			
kostanta					-7,301	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,474	1,340	0,184
Transparansi					0,150	0,117	0,908
Interaksi Pengetahuan &					-2,430	-0,365	0,716



Transparansi							
F (tabel) = 2,74						t (tabel) = 1,991	

Sumber : Data Primer diolah, 2005

Tabel 14. Regresi Hipotesis Keempat.

Keterangan	n	Adj R ²	F	Sig	Nilai Koefisien	t-value	p-value
Sampel Dewan	78	86%	85,854	0,00			
Kostanta					8,370	-0,219	0,828
Pengetahuan					2,474	1,340	0,184
Interaksi Pengetahuan, Partisipasi & Transparansi					0,888	1,222	0,226
F(tabel) = 2,74					t (tabel) = 1,991		

Sumber : Data Primer diolah, 2005